

**STRATEGIES FOR POVERTY ALLEVIATION IN SOUTH
LAMPUNG REGENCY
(STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN)**

Ratni Puspa Dewi

Regional Development Planning Agency of Lampung
Province, The Provincial Government of Lampung
Indonesia

Article Info

Article history:

Received: June 21, 2024

Revised: June 22, 2024

Accepted: July 2, 2024

Keywords:

Education and skills training
Policy recommendations
Poverty alleviation programs
Poverty rate trends
South Lampung Regency

Abstract

Poverty is one of the complex and profound development issues in many countries. Government poverty alleviation programs aim to improve the quality of life of individuals and communities trapped in poverty conditions and to reduce the social and economic disparities that occur. According to the publication from the Central Statistics Agency (BPS) of Lampung Province, the poverty rate in South Lampung Regency was 14.19 percent (in 2021), 13.14 percent (in 2022), and 12.79 percent (in 2023). This paper is written to identify the causes of the still high poverty rate in South Lampung Regency and to recommend policies to reduce poverty levels in South Lampung Regency. The conclusion of this paper is that the poverty alleviation program in South Lampung Regency is not yet significant enough to achieve the poverty reduction target outlined in the South Lampung Regency RPJMD Document for the years 2021 - 2026. The policy recommendation formulated is the need for education assistance and skills training for poor families.

To cite this article: Puspa, Dewi Ratni. (2024). Strategies For Poverty Alleviation In South Lampung Regency. *Forecasting : Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 11-15

INTRODUCTION

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan pembangunan yang kompleks dan mendalam di banyak negara. Permasalahan kemiskinan merupakan program prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat yang terjebak dalam kondisi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya strategi dan program dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat untuk memajukan kesejahteraan umum dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan dari bumi pertiwi.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Permasalahan kemiskinan terjadi hampir secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah sebesar 2.109 km², dengan 17 (tujuh belas kecamatan) kecamatan dan 256 desa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1.081.115 jiwa dengan komposisi 51,11 persen berjenis kelamin laki-laki dan 48,99 persen berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,19 pada tahun 2021, 13,14 tahun 2022 dan 12,79 tahun 2023. Dengan kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai kabupaten ke-5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026, target kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 13,88 (tahun 2021), 13,00 (tahun 2022) dan 12,48 (tahun 2023). Dengan demikian, target kemiskinan tersebut tidak tercapai. Sehingga diperlukan strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

Manfaat tulisan ini adalah untuk merumuskan penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan dan merekomendasikan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

METHOD

Dalam penelitian ini metodologi yang adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai fakta dan situasi dari berbagai data yang terkumpul mengenai permasalahan kemiskinan yang terjadi di lapangan.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,19 pada tahun 2021, 13,14 tahun 2022 dan 12,79 tahun 2023. Dengan kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai kabupaten ke-5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung. Adapun rumah tangga miskin di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 143.507 rumah tangga.

Jika ditinjau dari sebaran rumah tangga miskin, kecamatan yang memiliki rumah tangga miskin terbanyak adalah Kecamatan Natar sebanyak 16,19 persen, Kecamatan Katibung sebanyak 8,71 persen dan Kecamatan Kalianda sebanyak 8,49 persen.

Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan salah satunya dikarenakan faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan Data BPS, angka partisipasi sekolah jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki di Kabupaten Lampung Selatan adalah penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar sederajat dan SMP sederajat masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat

dari jumlah penduduk miskin dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar sederajat sebanyak 242,489 jiwa dan SMP sederajat sebanyak 242.489 jiwa.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

SEKTOR	JUMLAH	PERSENTASE
Perkebunan	24.932	12,50
Pertanian tanaman padi & Palawija	67.358	33,79
TOTAL	199.334	100,00

VARIABEL	JUMLAH	PERSENTASE
Paket B	388	0,07
Paket C	743	0,16
Paket A	1.936	0,43
M.Aliyah	2.689	0,61
Perguruan Tinggi	3.445	0,78
M.Ibtidaiyah	7.121	1,61
M.Tsanawiyah	9.214	2,09
SMA/SMK/SMALB	66.339	15,07
SMP/SMPLB	105.763	24,03
SD/SDLB	242.489	55,09
TOTAL	440.127	100,00

Sumber: Lampung Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Dilihat dari tabel 1, persentase masyarakat yang yang berpendidikan Sekolah Dasar sederajat mencapai 55,09 persen dan SMP sederajat sebesar 24,04 persen. Jika kedua tingkat pendidikan ini digabung, maka akan didapat angka sebesar 79,13 persen penduduk miskin yang berpendidikan sampai SMP sederajat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Lampung Selatan

SEKTOR	JUMLAH	PERSENTASE
Informasi & komunikasi	225	0,11
Keuangan & asuransi	253	0,12
Jasa Kesehatan	336	0,16
Listrik dan gas	499	0,25
Pemulung	658	0,33
Kehutanan & pertanian lainnya	850	0,42
Pertambangan/ penggalian	860	0,43
Perikanan budidaya	1.203	0,60
Hotel & rumah makan	1.259	0,63

Jasa Pendidikan	1.446	0,72
Perikanan tangkap	1.853	0,92
Hortikultura	1.943	0,97
Perternakan	3.433	1,72
Transportasi & pergudangan	9.230	4,63
Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan	12.897	6,47
Industri pengolahan	14.944	7,49
Lainnya	15.408	7,72
Perdagangan	15.750	7,90
Bangunan/ konstruksi	23.997	12,03

SEKTOR	JUMLAH	PERSENTASE
Perkebunan	24.932	12,50
Pertanian tanaman padi & Palawija	67.358	33,79
TOTAL	199.334	100,00

Sumber : Sumber: Lampung Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sektor pertanian yang cukup besar dan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija berjumlah 67.358 orang atau sebesar 33,79 persen dari total pekerja yang ada. Pekerja di sektor perkebunan di urutan ke-2 dengan jumlah pekerja sebanyak 24.932 orang atau 12,50 persen. Pekerja Pertanian tanaman padi dan palawija mendominasi di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Lampung Selatan

VARIABEL	JUMLAH	PERSENTASE
PNS/TNI/Polri/ BUMN/BUMD/anggota legislatif	444	0,22
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2.253	1,16
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar	16.489	8,49
Pekerja keluarga/tidak dibayar	27.052	13,93
Pekerja bebas non pertanian	29.853	15,37
Berusaha sendiri	33.409	17,20
Pekerja bebas pertanian	36.065	18,57
Buruh/karyawan/ pegawai swasta	48.602	25,03
TOTAL	194.167	100,00

Sumber: Lampung Selatan Dalam Angka 2023, diolah

Jika dilakukan pencermatan terhadap status pekerjaan utama dari tenaga kerja yang ada, pekerja di sektor pertanian dan perkebunan statusnya adalah buruh tani atau pekerja harian lepas yang

mencapai 18,57 persen. Ciri yang paling menonjol dari buruh tani ini adalah mereka bekerja dengan skill yang rendah dan tidak memiliki lahan pertanian/perkebunan sendiri. Dengan kondisi tersebut, cukup sulit bagi buruh tani untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya karena upah yang didapat dari bekerja harian lepas ini sangat rendah.

CONCLUSION AND RECOMENDATION

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan belum cukup signifikan untuk mencapai target penurunan kemiskinan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan adanya kesenjangan dalam partisipasi sekolah antara jenjang pendidikan tinggi dan rendah. Pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, karena dapat membatasi akses ke peluang pekerjaan yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disusun rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan melaksanakan program Pengentasan kemiskinan akibat rendahnya pendidikan dan juga status pekerjaan utama sebagai buruh tani memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara lain :

- 1) Memberikan pelatihan dan pendidikan keahlian kepada mereka yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar dan menengah khususnya buruh tani sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.
- 2) Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan pendidikan.
- 3) Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa yang berasal dari keluarga buruh tani atau keluarga berpendapatan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, (2021). *RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026*. Kalianda
- BPS Kabupaten Lampung Selatan, (2023). *Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2023*. Kalianda
- Creswell, John W. (2005). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California : Sage Publication
- Khomsan, Ali. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Tantoro, Swiss. (2014). *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta